

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup besar di dunia, populasi penduduk Indonesia di dunia menempati urutan keempat dalam daftar negara berpenduduk terbanyak di dunia.¹ Angka itu menempatkan jumlah populasi penduduk Indonesia dari waktu ke waktu mengalami suatu perubahan, perubahan dari jumlah penduduk inilah yang disebut dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dapat mencakup pertambahan jumlah penduduk dan pengurangan jumlah penduduk, dimana pertumbuhan penduduk disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Pertumbuhan penduduk menjadi suatu fenomena yang dapat didefinisikan sebagai jumlah penduduk di suatu wilayah dengan waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya.² Pertumbuhan penduduk yang dapat meningkatkan jumlah penduduk tinggi, dapat memunculkan suatu permasalahan dalam bidang kependudukan, yaitu mempengaruhi laju atau lambatnya suatu pembangunan nasional. Aspek ini merupakan komponen kehidupan masyarakat Indonesia, yang akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi, ataupun politik.

Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Menurut data terbaru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan bahwa pada tahun 2019, jumlah penduduk DKI Jakarta

¹ Eka Susi Sulistyowati. 2018. *Dinamika Kependudukan*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi.

² *Ibid.*

mencapai 11.063.324 jiwa, termasuk 4.380 jiwa adalah WNA dengan Luas wilayah DKI Jakarta sebagaimana dalam Keputusan Gubernur No 171 Tahun 2007 adalah 662,33 km². Dari data ini dapat dihitung bahwa kepadatan penduduk DKI Jakarta mencapai 16.704 jiwa/km². Hal ini jelas menunjukkan ketimpangan yang besar dibandingkan dengan kepadatan penduduk Indonesia secara keseluruhan mencapai 141 jiwa/km².³

Berikut ini merupakan statistik kepadatan penduduk di DKI Jakarta, sebagaimana Grafik dibawah ini:⁴

Tabel 1.1 Statistik Kepadatan Penduduk DKI Jakarta Tahun 2020



Sumber: Data Statistik Sektor Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga wilayah di DKI Jakarta yang memiliki kepadatan penduduk di atas rata-rata, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Dari ketiga wilayah tersebut, Jakarta Pusat merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terpadat di DKI Jakarta.

³Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. <<https://statistik.jakarta.go.id/>> [diakses pada tanggal 11 April 2023].

⁴ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. <<https://statistik.jakarta.go.id/berapa-kepadatan-penduduk-dki-jakarta-saat-ini/>> [diakses pada tanggal 12 April 2023].

Meskipun Jakarta Pusat hanya memiliki luas 48,13 km² atau 7,3% dari luas total DKI Jakarta, wilayah ini dihuni oleh 1.149.176 penduduk, termasuk 729 WNA. Jakarta Pusat merupakan wilayah terpadat dengan rata-rata kepadatan mencapai 22.034 jiwa/km². Hal ini menunjukkan bahwa sebagai kota pusat pemerintahan, Jakarta Pusat mengalami kepadatan penduduk yang sangat tinggi meskipun memiliki luas wilayah yang relatif kecil.

Berikut ini merupakan laju pertumbuhan penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2019-2021 sebagaimana tabel dibawah ini:⁵

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2019-2021

Kab/Kota	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk								
	Jumlah Penduduk (ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun			Persentase Penduduk		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kep Seribu	24,30	27,75	28,24	1,79	2,69	2,24	0,23	0,26	0,27
Jakarta Selatan	2 264,70	2 226,81	2 233,86	1,18	0,75	0,40	21,44	21,08	21,05
Jakarta Timur	2 937,86	3 037,14	3 056,30	1,09	1,17	0,80	27,80	28,76	28,81
Jakarta Pusat	928,11	1 056,90	1 066,46	0,34	1,53	1,14	8,75	10,01	10,05
Jakarta Barat	2 589,93	2 434,51	2 440,07	1,60	0,63	0,29	24,61	23,05	23,00
Jakarta Utara	1 812,91	1 778,98	1 784,75	1,22	0,76	0,41	17,17	16,84	16,82
DKI Jakarta	10 557,81	10 562,09	10 609,68	1,19	0,92	0,57	100,00	100,00	100,00

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Populasi jumlah penduduk tersebut pada tiap tahunnya akan terus bertambah, sehingga perlu adanya sebuah upaya untuk mengendalikan kepadatan penduduk. Problematika tentang kepadatan penduduk di mengharuskan pemerintah untuk mencari sebuah solusi dari kondisi tersebut, yaitu dengan adanya sebuah kebijakan untuk pemecahan masalah-masalah yang sedang terjadi terkait dengan kependudukan.

Kebijakan publik sebagai suatu upaya pemerintah guna merespon terhadap

⁵Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. <<https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/124/1/3-1-1->> [diakses pada tanggal 14 April 2023]

sebuah kondisi. Sebagaimana tujuan dari adanya kebijakan publik yakni agar dapat mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peraturan – peraturan yang telah dibentuk oleh pemerintah. Dalam mengatasi permasalahan terkait kependudukan, salah satu kebijakan yang dibuat Pemerintah adalah Program Kampung Keluarga Berencana.

Kampung KB merupakan ikon Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan fokus utamanya untuk meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat di tingkat desa, kampung atau yang setara, secara bersamaan juga memajukan sektor-sektor terkait lainnya guna mewujudkan keluarga berkualitas. Terdapat beberapa aspek dalam mengukur keberhasilan Kampung KB. Pertama, aspek pengendalian jumlah penduduk, yang merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan program ini. Kedua, diukur dari peningkatan kualitas penduduk yang dapat dilihat berdasarkan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Kampung KB memiliki peran strategis dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut untuk meningkatkan kualitas keluarga dengan pendekatan berencana.

Kampung KB dibentuk sebagai bagian dari usaha untuk mengimplementasikan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dapat diidentifikasi melalui delapan fungsi keluarga, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga yang meliputi delapan fungsi keluarga, yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan

lingkungan.⁶

Kampung KB adalah bentuk pelaksanaan agenda prioritas ketiga dalam Nawacita, yaitu "Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan," dan agenda prioritas kelima "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia" melalui peran BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). Sesuai dengan hal tersebut, BKKBN melakukan pembentukan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) sebagai langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut.

BKKBN berperan sebagai *leading sector* atau sektor utama yang memimpin program Kampung KB dan melakukan koordinasi dengan pemerintahan di tingkat Kota, Kecamatan, hingga Kelurahan. Selanjutnya, Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pembentukan Kampung KB di bawah pengawasan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP). Semua itu adalah langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui program Kampung KB yang melibatkan partisipasi berbagai tingkatan pemerintahan dan BKKBN sebagai lembaga yang mengurus Kependudukan dan Keluarga Berencana secara nasional.

⁶Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga

Berikut ini bagan dekonsentrasi Kampung KB dari Pusat hingga tingkat Kelurahan:

Gambar 1.1 Koordinasi Kampung KB dari Pusat hingga Tingkat Kelurahan



Dalam program Kampung KB terdapat integrasi dan konvergensi berbagai program pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dimulai dari keluarga hingga masyarakat secara keseluruhan.⁷ Tujuan dari program ini yaitu untuk mengatasi masalah kependudukan mulai dari penurunan angka kelahiran hingga peningkatan kualitas

⁷BKKBN. <<https://kampungkb.bkkbn.go.id/>> [diakses pada tanggal 16 April 2023]

masyarakat agar dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk benar – benar berkontribusi dalam pembangunan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸

Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah desa atau kampung diikutsertakan dalam program Kampung KB. Kriteria utamanya adalah kampung tersebut harus memiliki jumlah keluarga miskin di atas rata-rata wilayah tersebut, misalnya jumlah keluarga miskin di desa/kampung tersebut harus melebihi rata-rata Kecamatan di mana desa/kampung itu berada. Kampung tersebut juga harus memiliki pencapaian tingkat keluarga berencana (KB) yang rendah. Berdasarkan kriteria wilayah, terdapat beberapa unsur yang dipenuhi seperti berada di wilayah kumuh, kampung pesisir atau nelayan, Daerah Aliran Sungai (DAS), daerah bantaran Kereta Api, kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan), terpencil, wilayah perbatasan, kawasan industri, kawasan wisata, dan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Adapun kriteria khusus yang harus dipenuhi yaitu memiliki infrastruktur yang kurang memadai dan tingkat pendidikan yang rendah.⁹

Program Kampung KB terus dijalankan dan diperluas cakupannya di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di Ibukota Provinsi DKI Jakarta. Untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian melakukan langkah lanjutan melalui Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB.

⁸Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. <<https://puspa.jakarta.go.id/blog/mengenal-kampung-kb>> [diakses pada tanggal 16 April 2023]

⁹Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. <https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/9841/kampung-kb-inovasi-strategis-memberdayakan-masyarakat/0/artikel_gpr> [diakses pada tanggal 17 April 2023]

Instruksi tersebut memerintahkan kepada para Walikota/Bupati untuk mengkoordinasikan dan melakukan pembentukan Kampung KB di wilayah Kota Administrasi masing-masing. Terkait dengan pendanaan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB di Provinsi DKI Jakarta diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau melalui sumber pembiayaan sah lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 844 Tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana.¹⁰

Berikut adalah data mengenai jumlah Kampung KB yang telah dibentuk hingga tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta:¹¹

Tabel 1.3 Data Jumlah Kampung KB di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No.	Wilayah	Jumlah Kampung KB
1.	Jakarta Pusat	32
2.	Jakarta Utara	19
3.	Jakarta Barat	27
4.	Jakarta Selatan	25
5.	Jakarta Timur	28
6.	Kepulauan Seribu	5
	Jumlah	136

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian

Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta

Kelurahan Cideng merupakan salah satu kelurahan yang tercatat sebagai

¹⁰Pemprov DKI Jakarta, Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 844 Tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana.

¹¹Dinas PPAPP DKI Jakarta. <<https://puspa.jakarta.go.id/blog/data-kampung-kb-di-dki-jakarta>> [diakses pada tanggal 18 April 2023].

Kampung KB di Jakarta Pusat sekaligus Kampung KB yang dijadikan lokus dalam penelitian ini. Kelurahan ini menjadi bagian dari Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kelurahan Cideng terdiri dari 10 RW dan 114 RT, serta dengan 149 Dasawisma. Kelurahan ini mempunyai luas wilayah 126,38 Ha. dan jumlah penduduk 18.003 jiwa terdiri dari 6.439 Kepala Keluarga.¹² Kelurahan Cideng berbatasan dengan Kelurahan Duri Pulo disebelah utara, Kelurahan Tomang disebelah barat, Kelurahan Petojo Selatan di sebelah timur, dan Kelurahan Petamburan di sebelah selatan.

Kampung KB di kelurahan Cideng dicanangkan pada tanggal 1 Januari 2017 dan kemudian diresmikan pada tanggal 22 Februari 2017. Pendirian Kampung KB di kelurahan ini kemudian dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Lurah Cideng Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Susunan Kepengurusan Kampung KB di kelurahan tersebut.¹³ Kelurahan Cideng memiliki dua Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), yaitu RPTRA Kenanga yang merupakan Pembangunan Tahap I dan terletak di RW 005, serta RPTRA Mustika yang merupakan Pembangunan Tahap IV dan berada di RW 011. Untuk pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan Cideng, difokuskan di RPTRA Kenanga Cideng yang berlokasi di Jl. Makian No. 1 RT. 002/005, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat.¹⁴

Adapun fenomena atau permasalahan yang dilihat oleh peneliti di Kampung KB Kelurahan Cideng yaitu berdasarkan data pada laman website Kampung KB,¹⁵

¹²BKKBN. <<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/2779/kampung-kb-kelurahan-cideng>> [diakses pada tanggal 19 April 2023].

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

terlihat masih belum optimalnya jumlah keikutsertaan KB Pasangan Usia Subur (PUS), dimana dari 2693 jumlah PUS hanya 1983 (73,6%) yang telah menjadi akseptor KB dan sisanya sebanyak 710 PUS (26,4%) masih belum menjadi akseptor KB. Partisipasi keluarga dalam berbagai Poktan (Kelompok Kegiatan) juga terbilang masih sangat rendah, seperti partisipasi pada Bina Keluarga Lansia (BKL) hanya sebesar 20,5% dari 317 keluarga yang memiliki lansia, partisipasi pada Bina Keluarga Remaja (BKR) hanya sebesar 7,6% dari 430 keluarga yang memiliki remaja, dan partisipasi pada Bina Keluarga Balita (BKB) hanya sebesar 22,9% dari 414 keluarga yang memiliki balita.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat”.

¹⁶*Ibid.*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian tentang “Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat” diharapkan dapat memberikan penyempurnaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan penanganan pertumbuhan penduduk.

2) Manfaat Praktis:

a) Bagi Peneliti

Temuan-temuan dalam penelitian ini sekiranya dapat meningkatkan pemahaman tentang efektivitas dari kebijakan publik berdasarkan materi-materi yang telah dipelajari dalam perkuliahan.

b) Bagi Universitas

Sebagai sumber informasi atau referensi untuk penelitian yang akan datang. Hasil temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengetahuan terkait kebijakan publik.

c) Bagi Kelurahan Cideng

Dapat dijadikan sebagai masukan untuk perkembangan kampung KB di Kelurahan Cideng untuk terus melaksanakan program tersebut secara berkesinambungan.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi panduan dan referensi yang berguna bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan tema terkait.

1.5 Struktur Penulisan

Penulisan rencana proposal penelitian yang akan dilakukan penulis terdiri dari masing-masing bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

BAB I berisi mengenai uraian – uraian latar belakang masalah yang diangkat oleh penulis, rumusan dalam masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), dan sistematika atau tata cara penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB II berisi tentang uraian – uraian kajian pustaka, baik itu landasan teori atau kajian pustaka umum lainnya, penelitian sebelumnya yang sejenis, dan juga kerangka Berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III terdiri dari uraian tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, fokus dan lokasi penelitian ini dilakukan, teknik dalam memperoleh data, penentuan informan, sumber data, dan teknik/ metode dalam menganalisis data, serta keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV dalam penelitian ini berisikan tentang uraian tentang hasil penelitian berupa data yang selama peneliti turun ke lapangan. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan dan arsip maupun dokumentasi yang ada dilokasi penelitian. Data-data pengamatan yang terdiri dari struktur instansi dan data umum instansi, serta data-data lainnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

BAB V memaparkan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh setelah melakukan olah data.

